

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan suatu kota berkaitan erat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang senantiasa bertambah setiap tahunnya. Akibat jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Keterbatasan kemampuan dalam membangun tempat tinggal yang layak serta keterbatasan lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang memadai serta memenuhi ketentuan menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh wilayah perkotaan, terutama pada kota-kota besar misalnya Jakarta, pada umumnya diakibatkan oleh rendahnya tingkat penghasilan mayoritas masyarakat di samping oleh sebab-sebab lain. Selain itu, kawasan permukiman kumuh juga muncul akibat pesatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota, dan dengan harga tanah yang semakin mahal menyebabkan masyarakat dipaksa hidup dengan berdesakan dan berdempetan. Dengan terbatasnya penghasilan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan mutu dan ketertiban lingkungan pun menjadi sangat kurang. (Ramadhani, 2018).

Selain itu pada perkembangan berikutnya, dengan maraknya pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik, berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam kehidupan sosial masyarakat perkotaan,

misalnya muncul kesan bahwa kota menjadi terlihat kumuh, masyarakat mudah dijangkiti penyakit di pemukiman kumuh dan munculnya anggapan-anggapan bahwa pemerintah kota setempat tidak mampu mengelola peningkatan kualitas perumahan yang berkualitas. (Sugandi; Kheyene M; dan Johantan Alfando, 2020)

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan penduduk perkotaan tersebut, secara umum diakibatkan oleh adanya arus urbanisasi yang tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sehingga telah mengakibatkan semakin meluasnya kawasan permukiman kumuh, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi perkotaan dan sekitarnya yang mendukung pembangunan ekonomi provinsi merupakan kawasan strategi yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya upaya menyeimbangkan dan mengembangkan prasarana lingkungan yang memadai terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi dan perumahannya.

Masalah ketimpangan distribusi penduduk karena distribusi penduduk yang tidak merata akan menyebabkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk pada suatu wilayah karena tiap parsial kewilayahan mengalami jumlah penduduk yang tidak merata dan berimbang jumlahnya. Wilayah dengan jumlah penduduk yang padat akan memiliki permasalahan yang cukup kompleks seperti masalah pengangguran, kemiskinan, permasalahan akan kebutuhan lahan, kebutuhan akan fasilitas umum dan kebutuhan dasar masyarakat yang memadai seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan masalah – masalah sosial lainnya. (RKPD Kota Magelang, 2020)

Salah satu tujuan SDGs ke-11 adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu tentang mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh terhadap bencana dan berkelanjutan (UCLG, 2015). ini menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di perkotaan tidak lepas dari peran penting pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi SDGs secara partisipatif. Partisipasi dalam hal ini adalah partisipasi penduduk atau kerjasama yang akan melibatkan masyarakat dalam proses secara keseluruhan dan bottom up, bukan kepentingan pihak tertentu (Subadyo, 2012)

Terkait dengan Kota Magelang yang dengan wilayah relatif sangat kecil, masalah distribusi penduduk tidak membawa masalah sosial yang relatif besar namun tetap saja hal ini perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pemerataan pembangunan di Kota Magelang. Jumlah penduduk pada tahun 2018 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 121.992 jiwa dengan wilayah Kota Magelang seluas 18,12 km², kepadatan penduduk pada tahun 2018 sebanyak 6.583 jiwa/km². Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah ini lebih tinggi sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Magelang (menunjukkan tren meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk). Kepadatan penduduk tahun 2017 sebanyak 6.566 jiwa/ km². Semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk menunjukkan tingkat kepadatan penggunaan lahan kawasan konstruksi, sehingga dapat dikatakan beban lingkungan semakin tinggi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana perumahan seperti halnya drainase, sanitasi, air bersih yang layak dan memenuhi semua kebutuhan pemerataan penduduk di lahan yang terbatas (RKPD Kota Magelang, 2020)

Tabel 1.1
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Magelang Tahun 2016- 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2016	121.293	6.694
2017	121.673	6.715
2018	121.992	6.733
2019	122.245	6.747
2020	122.532	6.762

Sumber : (RKPD Kota Magelang, 2022)

Tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Magelang sehubungan dengan upaya penataan ruang dan kota dan upaya memenuhi pelayanan dan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dengan terbatasnya lahan permukiman menjadikan munculnya masalah tersendiri bagi daerah perkotaan khususnya bagi Kota Magelang yang merupakan kota kecil dengan luas wilayah yang terbatas. Dengan wilayah yang hanya 18.12 km² dan jumlah penduduk yang menunjukkan trend yang meningkat setiap tahun. Hal ini sangat umum terjadi di semua wilayah di Jawa Tengah. Bertambahnya jumlah penduduk dapat di sebabkan karena kelahiran atau juga urbanisasi. Kepadatan penduduk di Kota Magelang yang relatif tinggi dibandingkan

dengan wilayah Kota dan Kabupaten lain di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki potensi dan daya tarik yang cukup tinggi.

Menurut data kepadatan penduduk kantor Dinas Sipil Kota Magelang, jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 132.662 jiwa, dengan kepadatan penduduk Kota Magelang sebesar 7.321 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 132.261 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk Kota Magelang 7.299 jiwa/km². Data kepadatan penduduk tersebut secara lebih rinci per kelurahan akan ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel 1.2
Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Tahun 2014 – 2018

Kecamatan/ Kelurahan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jml Pendk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)								
MAGELANG SELATAN										
Jurangombo Utara	7.198	3.185	4.287	7.391	4.241	6.426	4.284	6.491	4.198	6.360
Jurangombo Selatan	8.582	8.847	7.271	3.217	7.248	3.419	7.311	3.432	7.229	3.393
Magersari	4.328	7.462	8.699	4.859	8.645	5.542	8.706	5.545	8.620	5.490
Tidar Utara	5.837	4.596	8.533	8.796	8.478	7.707	8.476	7.776	8.160	7.486
Tidar Selatan	8.860	6.420	5.854	4.609	5.839	4.423	5.856	4.436	5.726	4.370
Rejowinangun Selatan	8.873	20.635	8.524	19.830	8.488	22.941	8.477	22.911	8.291	22.408
MAGELANG TENGAH										
Magelang	7.992	6.394	8.017	6.414	8.033	6.478	8.111	6.488	7.874	6.299
Kemirirejo	12.563	12.690	5.893	6.696	5.857	6.810	5.771	6.710	5.598	6.509
Cacban	6.182	7.025	8.141	9.808	8.149	9.476	8.265	9.610	8.034	9.341
Rejowinangun Utara	8.214	9.896	12.536	12.663	12.303	13.520	12.183	13.388	11.998	13.331

Panjang	6.834	19.526	6.781	19.374	6.731	18.697	6.646	18.461	6.485	18.013
Gelangan	8.335	10.290	8.370	10.333	8.304	9.330	8.266	9.288	8.178	9.188
MAGELANG UTARA										
Wates	9.242	7.899	8.952	7.628	8.898	7.541	8.941	7.642	8.856	7.569
Potrobangsan	8.887	6.836	8.620	6.631	8.478	6.280	8.586	6.360	8.518	6.309
Kedungsari	7.605	5.718	7.506	5.644	7.448	5.642	7.399	5.605	7.387	5.596
Kramat Utara	4.966	5.774	4.843	5.631	4.815	4.864	4.825	4.825	4.774	4.774
Kramat Selatan	8.164	5.592	8.057	5.518	8.075	5.569	8.170	5.634	8.094	5.582

Sumber : (RKPD Kota Magelang, 2022)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 mengamanatkan penanganan masalah kualitas lingkungan hidup (yaitu dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh, mencegah berkembangnya permukiman kumuh baru dan mata pencaharian berkelanjutan), memerlukan pembangunan dan pengembangan wilayah perkotaan. Berdasarkan data perhitungan tahun 2016 di hampir seluruh wilayah Indonesia masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar sesuai dengan hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Luasan tersebut diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada upaya penanganan yang inovatif, menyeluruh, terarah, dan tepat sasaran. (SE. DJCK No.110, 2016) (Rachma, 2019)

Tabel 1.3

Data Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Tengah sesuai RPJMN 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Kab/Kota (km ²)	Presentase Luas Wilayah (%)	Target Pengurangan Kumuh Jateng (Ha)	Presentase Kawasan Kumuh (%)
1	Cilacap	2 124,47	6,48	20,84	0.009
2	Banyumas	1 335,30	4,07	69,58	0.052
3	Purbalingga	677,55	2,07	32,39	0.047
4	Banjarnegara	1 023,73	3,12	58,22	0.056
5	Kebumen	1 211,74	3,69	69,57	0.057
6	Purworejo	1 091,49	3,33	82,69	0.075
7	Wonosobo	981,41	2,99	70,83	0.072
8	Magelang	1 102,93	3,36	69,91	0.063
9	Boyolali	1 008,45	3,07	0,36	0.0003
10	Klaten	658,22	2,01	186,41	0.283
11	Sukoharjo	489,12	1,49	35,28	0.072
12	Wonogiri	1 793,67	5,47	24,47	0.013
13	Karanganyar	775,44	2,36	68,28	0.088

14	Sragen	941,54	2,87	2,33	0.002
15	Grobogan	2 013,86	6,14	50,77	0.025
16	Blora	1 804,59	5,50	48,11	0.044
17	Rembang	887,13	2,70	59,53	0.067
18	Pati	1 489,19	4,54	107,39	0.072
19	Kudus	425,15	1,30	95,06	0.223
20	Jejara	1 059,25	3,23	49,26	0.046
21	Demak	900,12	2,74	38,15	0.042
22	Semarang	950,21	2,90	179,04	0.188
23	Temanggung	837,71	2,55	8,34	0.009
24	Kendal	1 118,13	3,41	230,19	0.205
25	Batang	788,65	2,40	88,86	0.112
26	Pekalongan	837,00	2,55	614,52	0.734
27	Pemalang	1 118,03	3,41	240,74	0.215
28	Tegal	876,10	2,67	50,00	0.057
29	Brebes	1 902,37	5,80	27,94	0.014
30	Kota Magelang	18.12	0,05	121.17	6.687
31	Kota Surakarta	46,01	0,14	359.50	7.813
32	Kota Salatiga	57,36	0,17	21,84	0.830
33	Kota Semarang	373,78	1,14	415,93	1.112
34	Kota Pekalongan	45,25	0,14	195,59	4.322
35	Kota Tegal	39,68	0,12	191,13	4.816
	Jumlah	32 800,69	100,00	3982,88	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Dokumen Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Kota Magelang dengan luas 1.812 Ha menurut Keputusan Walikota Magelang tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Magelang mempunyai luas kawasan kumuh seluas 121,17 Ha atau 6,69% dari total luas Kota Magelang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Magelang berada di peringkat 2 untuk luasan kawasan kumuh tertinggi di Provinsi Jawa Tengah di bawah Kota Surakarta yang memiliki presentase luasan kawasan kumuh sebesar 7,81%. Dengan tingginya presentase luasan kawasan kumuh di Kota Magelang menjadikan permasalahan kekumuhan di Kota Magelang menjadi isu permasalahan prioritas yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kota Magelang.

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Kota Magelang, pemerintah Kota Magelang mencanangkan sebuah konsep baru dalam hal penataan wilayah yang disebut dengan program Kampung Teduh (Tematik, Terbuka, dan Hijau). Program ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang penanganan kawasan permukiman kumuh, dan Undang -Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yang memiliki makna bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menjamin hak dasar atas lingkungan yang sehat dan hunian yang layak. Program Kampung Teduh diluncurkan untuk mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 11, yakni menciptakan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Adapun SDGs poin 11 menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses ke perumahan layak, aman, terjangkau, dan memiliki pelayanan dasar. Poin tersebut juga termasuk penataan kumuh, seperti yang dilakukan oleh program Kampung Teduh Kota Magelang.

Konsep program kampung tematik sendiri sebelumnya telah dilaksanakan di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah, namun untuk program Kampung Tematik di Kota Magelang ini mengusung sebuah konsep inovasi baru yang dicetuskan oleh pemerintah Kota Magelang dimana merupakan sebuah kolaborasi antara ketiga poin yaitu, tematik, terpadu, dan hijau yang ketiga poin tersebut menjadi dasar nama program Kampung Teduh (Tematik, Terpadu dan Hijau) di Kota Magelang. Berdasarkan dokumen *masterplan* yang telah dirancang, dijabarkan bahwa poin tematik dalam program Kampung Teduh, artinya rencana pengembangan kampung kota dilaksanakan dengan tema tertentu sesuai kondisi

dan potensi pada masing-masing kampung. Poin terpadu, artinya substansi, proses perencanaan dan eksekusi program melibatkan lintas sektor baik dari sisi fisik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dan kolaborasi mewujudkan sinergitas antar *stakeholder*. Poin hijau, artinya rencana pengembangan kampung kota ini memperbanyak tumbuhan dalam rangka mendukung slogan Kota Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga, mendukung Program Kampung Organik, dan ruang terbuka hijau. Secara fisik, harapannya, pengembangan kampung kota ini dapat memperbaiki/meningkatkan kualitas dan visual lingkungan, sehingga dapat meningkatkan rasa nyaman, rasa senang, dan rasa suka bertempat tinggal di kampungnya (*livability*), dalam hal ini berpedoman pada Permen PUPR No 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang meliputi 7 aspek kekumuhan yang coba akan diperbaiki yaitu meliputi : kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi pengamanan proteksi kebakaran. Kampung Teduh juga bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian warga setempat melalui pembangunan sarana/ prasarana pendukung sesuai potensi. Dari segi sosial, Kampung Teduh juga diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan, kerjasama dan *sense of community* warga setempat karena warga menjadi memiliki sesuatu milik bersama di tempat tinggalnya untuk dijaga dan dirawat bersama-sama (*Dokumen Masterplan Program Kampung Teduh Kota Magelang*).

Rencana awal implementasi program Kampung Teduh di Kota Magelang, sesuai yang tertera dalam dokumen *masterplan* program Kampung Teduh, program ini direncanakan dilaksanakan di 3 kelurahan di tiap kecamatan yang dijadikan sebagai lokasi percontohan atau *pilot project* program Kampung Teduh, ketiga kelurahan tersebut yaitu : Kelurahan Kedungsari yang mewakili Kecamatan Magelang Utara, Kelurahan Panjang yang mewakili Kecamatan Magelang Tengah, dan Kelurahan Rejowinangun Selatan yang mewakili Kecamatan Magelang Selatan.

Tabel 1.4

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Magelang

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Kawasan Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh	Satuan
1.	Magelang Utara			
a.	Potrobangsan	130,00	16,20	Ha
b.	Wates	117,00	6,60	Ha
c.	Kramat Utara	86,00	6,59	Ha
d.	Kramat Selatan	146,00	9,26	Ha
e.	Kedungsari	133,00	6,37	Ha
2.	Magelang Tengah			
a.	Cacaban	83,00	5,62	Ha
b.	Gelangan	81,00	3,41	Ha
c.	Kemirirejo	88,00	3,89	Ha
d.	Magelang	125,00	3,84	Ha
e.	Panjang	35,00	3,88	Ha
f.	Rejowinangun Utara	99,00	13,62	Ha
3.	Magelang Selatan			
a.	Tidar Utara	97,00	8,46	Ha
b.	Tidar Selatan	127,00	11,98	Ha
c.	Jurangombo Selatan	226,00	2,95	Ha
d.	Jurangombo Utara	58,00	4,24	Ha
e.	Rejowinangun Selatan	43,00	6,71	Ha
f.	Magarsari	138,00	7,55	Ha

Kota Magelang	1.812,00	121,17	Ha
----------------------	-----------------	---------------	-----------

Sumber: Keputusan Walikota Magelang tahun 2015

Namun pada kenyataannya, rencana implementasi tidak berjalan sesuai dengan rencana, dari tiga kelurahan yang seharusnya dijadikan lokasi percontohan implementasi program secara bersamaan, namun sampai saat ini hanya di Kelurahan Panjang yang implementasinya sudah berjalan, sedangkan untuk kedua kelurahan lainnya masih dalam tahap perencanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh perhatian pemerintah termasuk dalam hal anggaran harus dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 sehingga rencana pembangunan Kampung Teduh terhambat.

Terpilihnya Kelurahan Panjang sebagai lokasi percontohan pertama program Kampung Teduh di Kota Magelang karena dengan kondisi lokasi di tengah kota dengan lingkungan yang padat dan berhimpitan menjadikan Kelurahan Panjang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang masih memiliki luasan daerah kumuh yang tinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

Gambar 1.1

Kondisi permasalahan Kelurahan Panjang



Sumber : Bappeda Kota Magelang, Dokumentasi Pribadi

Selain itu, Kelurahan Panjang memiliki banyak potensi yang bisa digali yaitu adanya potensi edukasi religi, wisata alam, serta UMKM yang melimpah di

wilayah tersebut sehingga tema yang diangkat menjadi tema implementasi Kampung Teduh di Kelurahan Panjang adalah Tema Kampung Edukasi.

Dengan adanya program Kampung Teduh ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam upaya mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru. Konsep Kampung Teduh dalam upaya penataan permukiman tersebut dinilai mampu dalam mendukung peningkatan penghasilan masyarakat yang berpenghasilan rendah di kawasan permukiman kumuh dengan memberikan dorongan kepada usaha kecil dan menengah, sekaligus mengusung upaya pelebagaan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan sosial budaya masyarakat setempat lainnya.

Dengan diimplementasikannya program Kampung Teduh di Kota Magelang, pemerintah Kota Magelang menetapkan target penanganan kawasan kumuh Kota Magelang yang harus dicapai oleh program Kampung Teduh. Target ini sesuai dengan *Key Performance Indicator* yaitu pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh 0 %, dan akses sanitasi layak 100%.

Pemerintah Kota Magelang menargetkan luas kawasan kumuh di Kota Magelang pada tahun 2020 sebesar 0% luas kawasan kumuh. Hal ini mengacu pada tujuan Program Kampung Teduh poin 1 dan 2 yaitu mengubah lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh (melalui perbaikan kondisi lingkungan), dan mencegah timbulnya permukiman kumuh melalui peningkatkan kualitas lingkungan hunian.. Ini artinya pemerintah berharap bahwa dengan diimplementasikannya program Kampung Teduh di Kota Magelang dapat memberantas seluruh kawasan kumuh yang ada di Kota Magelang. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, target

tersebut belum tercapai dimana masih terdapat 39,9 ha luas kawasan kumuh yang belum diatasi di Kota Magelang.

Dengan belum tercapainya target penurunan luasan kawasan kumuh yang telah ditetapkan, artinya implementasi program kampung Teduh di Kota Magelang belum terimplementasi secara optimal mengacu pada belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Program Kampung Teduh (Tematik, Terpadu, Dan Hijau) Di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang**, dengan pertanyaan yang akan dijawab adalah mengapa implementasi program Kampung Teduh belum berhasil secara optimal.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Target penurunan luasan kawasan kumuh belum tercapai.
2. Masih terdapat kawasan kumuh di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
4. Belum optimalnya upaya pemeliharaan sarana permukiman.
5. Belum optimalnya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan yang meliputi prasarana lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan serta prasarana sanitasi lingkungan.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi Program Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Teduh) di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Program Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Teduh) di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi program Kampung Teduh di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
2. Menganalisis faktor penghambat implementasi program Kampung Teduh di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan topik di atas maka dari itu riset penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan akademis untuk para pihak pengembangan masyarakat juga berfokus pada kawasan kumuh dan penataan kawasan kumuh.

b. Riset ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk para pendamping serta komunitas dalam implementasi Program Kampung Teduh.

2. Kegunaan Praktis

Riset ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian ilmu sebagai sumber informasi dan dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan pembaca di kalangan pembaca khususnya mahasiswa Universitas Diponegoro program studi Administrasi Publik.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi publik secara etimologis berasal dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* yakni *to administer* yang berarti *to manage* atau mengelola dan *to direct* atau menggerakkan, yang jika ditinjau dari kata tersebut berarti mengelola atau menggerakkan (Indradi dalam (Miranda, 2019). Menurut (Pasolong, 2007) kata publik sendiri pada dasarnya berasal dari Bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2004), pengertian dari administrasi publik adalah proses dimana sumber daya serta personil publik diorganisir serta dikoordinasikan dengan tujuan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan (Keban, 2004) mengemukakan bahwa

administrasi publik merupakan suatu istilah yang menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki peran sebagai agen tunggal yang memiliki kekuasaan atau dapat dikatakan sebagai regulator, yang aktif serta selalu melakukan inisiatif dalam rangka mengatur ataupun mengambil langkah dan prakarsa, yang bagi mereka penting atau baik untuk masyarakat sebab diasumsikan masyarakat merupakan pihak yang pasif, kurang mampu serta harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah meliputi kegiatan memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik. Yang tentunya hal tersebut dilakukan dengan melihat kebutuhan dari masyarakat karena kebijakan publik diharapkan dapat bekerja dengan tanggap serta efektif dan efisien terhadap masyarakat.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Berbagai perubahan terjadi seiring dengan kajian dan praktek administrasi publik yang terus berkembang. Berbagai kompleksitas persoalan dihadapi oleh administrator publik, dimana kompleksitas ini ditanggapi oleh para ahli dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Nicholas Henry dalam (Anneta, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat tiga prespektif dalam administrasi publik, yaitu: (1) Paradigma Pertama; Dikotomi antara Politik Administrasi (1900-1926), masalah-masalah yang menjadi fokus dalam ilmu administrasi negara terbatas seputas masalah organisasi,

kepegawaian, serta penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintah. Sedangkan masalah terkait pemerintah, politik, dan kebijaksanaan menjadi substansi ilmu politik. Paradigma ini mempertanyakan dimana seharusnya posisi administrasi negara. Dalam masa paradigma ini dilakukan pemisahan jelas antara administrasi dengan politik negara. (2) Paradigma Kedua; Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937), fokus penting dalam paradigma ini adalah mengenai prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku secara *universal* di setiap organisasi dan lingkungan sosial budaya. Lokus administrasi tidak menjadi masalah dalam paradigma ini. Pada masa paradigma ini administrasi mempunyai prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya yaitu administrasi negara dapat dilakukan dimanapun meski terdapat perbedaan budaya, lingkungan, visi, dan lainnya. Pada tahap ini administrasi negara mencapai puncak reputasinya. (3) Paradigma Ketiga; Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970), fase paradigma ini adalah suatu usaha guna menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Akibatnya adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Dalam paradigma ini terdapat dua perkembangan baru yakni: a. Tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai sebuah sarana yang bersifat epistemologis, b. Timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi. (4) Paradigma Keempat; Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), dalam masa paradigma ini administrasi negara

telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Hal ini diawali atas ketidaksenangan pada keadaan dimana ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Pada fase paradigma ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus tidak pada lokusnya. Usaha pengembangan, terutama diperoleh dari pengaruh fakultas administrasi perusahaan (*school of business administration*) mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. (5) Paradigma Kelima; Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970), pada masa paradigma ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik. Dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Beberapa departemen, fakultas dan akademi baru administrasi negara dan *public affairs* bermunculan. (6) Paradigma Keenam; *Governance*, *governance* menjadi sebuah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. Terdapat tiga pilar utama yang mendasari paradigma *governance*, ketiga pilar tersebut meliputi : a. pemerintah; b. sektor swasta; dan c. masyarakat. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke *governance*, dimana paradigma *governance* lebih menekankan pada kegiatan kolaborasi dalam membentuk kesetaraan serta keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*) maka dilakukan pengembangan sebuah paradigma baru administrasi publik yang dinamakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal

ini pemerintahan mengembangkan serta menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

1.6.3 Kebijakan Publik

Tomas R Dye (1981) telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah selaku pemegang kontrol terhadap keberlangsungan suatu negara, dalam prakteknya memiliki sikap yang apabila sikap tersebut baik diambil maupun tidak diambil adalah sebuah hasil dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Easton (1997) yang berpendapat bahwa ketika pemerintah merumuskan sebuah kebijakan, maka saat itu pula pemerintah memberikan nilai-nilai kepada masyarakat, hal ini dikarenakan setiap kebijakan mengandung sekumpulan nilai di dalamnya. Menurut Easton, dalam membuat sebuah kebijakan, maka pembuat kebijakan harus didasarkan pada nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat, sebab sebuah kebijakan bukan merupakan kebijakan yang baik tanpa adanya nilai yang terkandung di dalamnya.

Jika diamati pendapat dari Tomas R Dye (1981) dan Easton 1997 memiliki perbedaan yang mencolok. Dye menganggap meskipun pemerintah tidak melakukan respon apapun terhadap permasalahan yang

terjadi di masyarakat, dalam hal ini kebijakan yang dalam keadaan diam sama sekali tidak mengandung nilai. Namun menurutnya diamnya pemerintah adalah menjadi sebuah sikap yang dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan. Sedangkan di sisi lain, Easton (1997) berpendapat bahwa dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik pasti memuat seperangkat nilai yang ditujukan bagi objek kebijakan. Dengan pandangan tersebut Easton menilai sebuah kebijakan harus berupa tindakan yang tertuang dalam nilai-nilai yang terkandung.

Sehingga, dari kedua pendapat para ahli tersebut mengenai definisi kebijakan publik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah kebijakan dalam prosesnya harus sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta tidak boleh bertentangan dengan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga sebuah kebijakan publik tersebut akan mendapatkan esensi yang luar biasa saat diimplementasikan.

1.6.3.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik membutuhkan beberapa tahapan yang memerlukan banyak sekali variabel guna mendukung kebijakan yang akan dijalankan, oleh sebab itu para ahli melakukan sebuah kajian guna menemukan cara yang dinilai tepat dalam melakukan sebuah proses kebijakan publik sebab sebuah kebijakan memerlukan tahap-tahap dalam proses penyusunannya.

Menurut William N Dunn (2013) tahap-tahap dalam proses kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini sebuah masalah di dalam masyarakat diangkat oleh para pejabat untuk ditempatkan ke dalam masalah publik. Masalah-masalah tersebut haruslah berkompetensi untuk masuk kedalam agenda kebijakan, hingga pada akhirnya hanya ada beberapa masalah yang masuk kedalam agenda kebijakan dalam proses perumusan masalah. Pada tahap ini terdapat tiga kemungkinan terhadap masalah-masalah yang terjadi, yaitu : tidak disentuh sama sekali; menjadi fokus pembahasan; atau ditunda untuk waktu yang lama karena beberapa hal tertentu.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian diberi pemecahan masalah yang terbaik. Para pembuat kebijakan harus membuat berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang nantinya berbagai alternatif atau pilihan kebijakan tersebut akan berlomba untuk dipilih mana yang terbaik dalam memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan

Pada tahap ini akan dilakukan analisis dan peramalan terhadap berbagai alternatif yang ada hingga pada akhirnya akan mendapatkan satu alternatif terbaik yang kemudian akan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini alternatif yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebijakan akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tahap ini merupakan tahap penting dalam proses kebijakan karena sebuah kebijakan tidak akan berarti jika tidak sampai pada tahap ini. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan bersaing.

5. Tahap penilaian kebijakan

Sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi atau dilakukan penilaian, dengan tujuan untuk melihat bagaimana dampak dan hasil yang telah dicapai sebuah kebijakan tersebut terhadap target yang ditentukan.

Keseluruhan proses kebijakan tersebut saling terkait satu sama lain. Sehingga apabila berkurang satu maka akan mempengaruhi kebijakan publik itu sendiri.

1.6.4 Implementasi Program

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, ataupun pemenuhan. Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam sebuah kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Fitriani, 2020) konsep implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang dilaksanakan dengan target untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Sejalan dengan konsep pengertian tersebut, Handoyo (dalam Fitriani, 2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan

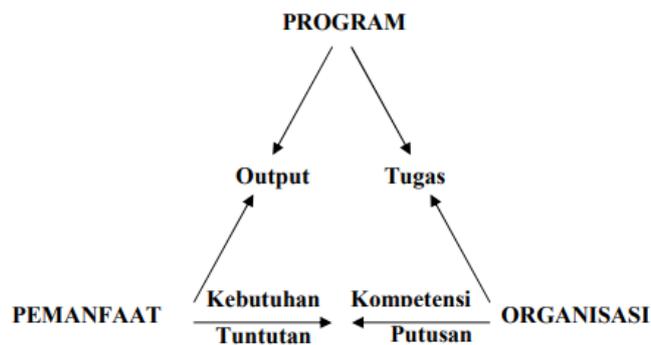
suatu kebijakan yang ditujukan kepada kelompok target /sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Sedangkan menurut Farida Yusuf (2000) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang coba dilakuakn seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebuah model implementasi dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Fitriani, 2020) yang disebut dengan "*a model of the policy implmentation process*" (model proses implmentasi kebijakan). Model tersebut menjelaskan bahwa konsep itu penting di dalam proses implementasi kebijakan yang meliputi : a.) perubahan; b.) kontrol/pengendalian; dan c.) kepatuhan bertindak. Di samping itu hubungan antara kebijakan dengan pencapaian kerja yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu : a.) ukuran dan tujuan kebijakan; b.) sumber-sumber kebijakan; c.) sifat instansi pelaksana; d.) komunikasi antar

organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; e.) sikap para pelaksana kebijakan; dan f.) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Setiap variabel yang terkait dengan tujuan dan sumber kebijakan yang tersedia. Pada akhirnya, fokus perhatian pada sikap para pelaksana kebijakan akan menjelaskan arah mereka dalam melaksanakan program kebijakan di lapangan.

Model lain mengenai implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten (1988). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan peminfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program

dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Pandangan lain dikemukakan oleh George Edward III dalam (Widodo, 2007) mengenai 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, faktor-faktor tersebut yaitu : a.) Komunikasi,

menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik tersebut perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam menjalankan sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. b.) Sumberdaya, menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) faktor sumberdaya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Faktor sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan

1. Sumberdaya Manusia

Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”. Oleh karena itu faktor sumberdaya manusia menjadi faktor krusial dalam mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan terbatasnya kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Edward III dalam (Widodo, 2007) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4. Sumberdaya Kewenangan

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa:

“Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c.) Disposisi, menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

d.) Struktur birokrasi, menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Dari beberapa teori di atas, peneliti menggunakan teori kesesuaian implementasi program menurut David C Korten untuk menganalisis implementasi program Kampung Teduh di Kota Magelang.

1.6.5 Faktor Penghambat Implementasi Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi, yaitu:

a. Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*), (Agus Dwiyanto, 2000). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan komplain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin

besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

b. Azas manfaat

Kebijakan sebagai upaya pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

c. Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu.

d. Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana.

e. Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan

Pandangan lain dikemukakan oleh George Edward III dalam (Widodo, 2007) mengenai 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, faktor-faktor tersebut yaitu :

a.) Komunikasi, menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik tersebut perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam menjalankan sebuah kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. b.)

Sumberdaya, menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) faktor sumberdaya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Faktor sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan

1. Sumberdaya Manusia

Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III

menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”. Oleh karena itu faktor sumberdaya manusia menjadi faktor krusial dalam mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan terbatasnya kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Edward III dalam (Widodo, 2007) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3. Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4. Sumberdaya Kewenangan

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa:

“Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan

mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.”

Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c.) Disposisi, menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

d.) Struktur birokrasi, menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Pandangan lain dikemukakan oleh Charles Jones (dalam Ricky Istamto, 1999: 296) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Gordon Chase (1979) yang mengemukakan bahwa hambatan utama dalam implementasi program, dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu :

1. Masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan operasional yang melekat pada program itu sendiri;
2. Masalah-masalah yang timbul dalam kaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan guna pelaksanaan program tersebut;
3. Masalah-masalah lain yang timbul karena keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi lainnya, yang diperlukan dukungan, bantuan dan persetujuannya guna pelaksanaan program tersebut.

Dari beberapa teori di atas, peneliti menggunakan teori dari Gordon Chase mengenai tiga masalah yang menjadi hambatan dalam implementasi program yaitu masalah operasional, masalah sumber daya, masalah keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi lainnya.

1.6.6 Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh menjadi salah satu permasalahan sosial di Indonesia yang sulit untuk diatasi. Beragam upaya dan program telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah permukiman kumuh, namun hingga kini masih banyak kita jumpai kawasan permukiman kumuh di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan.

1.6.6.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman merupakan sebuah wadah dalam lingkup kehidupan manusia tidak hanya menyangkut mengenai aspek fisik dan teknis saja tetapi juga mengenai aspek aspek sosial, ekonomi, budaya dan para penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Tidak hanya menyangkut mengenai tempat hunian rumah, melainkan juga tempat kerja, berbelanja serta bersantai (I. D. dan I. A. S. Lestari, 2013). Sesuai dengan yang telah dikemukakan (Sugandi; Kheyene M; dan Johantan Alfando, 2020) bahwa permukiman merupakan perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang berada di dalamnya. Yang artinya permukiman memiliki arti lebih luas dibandingkan dengan perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman adalah perpaduan antara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya). Permukiman kumuh merupakan sebuah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

1.6.6.2 Ciri-Ciri Permukiman Kumuh

Menurut Rikhwanto (2009) dalam Suparto (2014), Beberapa ciri-ciri daerah kumuh antara lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat Kelahiran maupun karena adanya urbanisasi;
2. Dihuni oleh warga dengan tingkat penghasilan rendah dan tidak tetap, yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Rumah-rumah yang merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak;
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, dengan ditandai oleh kondisi lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular;
5. Langkanya pelayanan kota seperti: air bersih, fasilitas MCK, listrik, dan sebagainya;
6. Pertumbuhannya terjadi dengan tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun menjadi tidak teratur dan tidak terurus, seperti: jalan yang sempit, halaman rumah tidak ada, dan sebagainya;
7. Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional;
8. Ditempati dengan status tanah yang tidak jelas (bermasalah); dan
9. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang

1.6.7 Program Kampung Teduh

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan 0 hektare kawasan kumuh di tahun 2020, pemerintah Kota Magelang mencanangkan sebuah konsep baru dalam hal penataan wilayah yang disebut dengan program Kampung Teduh (Tematik, Terbuka, dan Hijau). Implementasi program Kampung Teduh dilaksanakan dengan menggandeng seluruh kekuatan wilayah melalui bentuk kolaborasi dari mulai pemerintah kota, seluruh organisasi perangkat daerah, hingga ke masyarakat setempat dan dunia usaha. Konsep program Kampung teduh ini teretus dari diskusi intens di wilayah Badan Perencanaan Daerah (bappeda) Kota Magelang berkaitan dalam upaya perwujudan gerakan 100-0-100. Program Kampung Teduh di implementasikan berdasar pada tiga prinsip pendekatan yaitu : fokus, tuntas, dan berupaya mengubah wajah kampung serta konsep kolaborasi menginspirasi diskusi-diskusi selanjutnya untuk penanganan serta pencegahan munculnya kawasan kumuh baru di Kota Magelang. Berdasarkan pembahasan mengenai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut, dan didukung dengan kolaborasi yang ada, maka dicetuskan konsep Kampung Teduh (Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sekilas Informasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kampung Tematik, Terpadu dan Hijau (Kampung Teduh) dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tematik, berdasarkan potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

- b. Terpadu, terpadu antara berbagai *stakeholder* dan lintas sektoral.
- c. Hijau, mendukung slogan “Magelang Kota Sejuta Bunga”, program kampung organik dan ruang terbuka hijau.

1.6.7.1 Tujuan Program Kampung Teduh yaitu :

1. Mengubah lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh (melalui perbaikan kondisi lingkungan).
2. Mencegah timbulnya permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian.
3. Pelibatan partisipasi / peran serta masyarakat secara aktif di dalam program pencegahan kawasan kumuh dan penanggulangan kemiskinan.
4. Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.6.6.2 Manfaat Program Kampung Teduh sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan yang baik dan tertata.
2. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Membentuk *trademark* lingkungan melalui tematik yang diangkat sehingga menjadi ikon wilayah dan dapat memberikan pengaruh positif pada warga setempat seperti perubahan mindset dan perilaku warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

4. Memberikan pengaruh positif bagi kampung-kampung lainnya di kelurahan tersebut maupun di kelurahan lain agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan kampung teduh serupa.
5. Menuju masyarakat Kota Magelang yang semakin sejahtera dan mencegah tumbuhnya kawasan kumuh dan angka kemiskinan di Kota Magelang.
6. Diharapkan dapat menggugah para pemberi CSR untuk mereplikasi Kampung Teduh di kampung atau kelurahan wilayah lain di Kota Magelang.
7. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan yang baik dan tertata.

1.6.6.3 Prinsip Kampung Teduh

Beberapa prinsip yang akan menjadi pedoman perancangan dan pertimbangan penilaian adalah :

1. Unik, kreatif dan berbasis karakteristik lokal, berdasar potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
2. Lintas sektoral dan lintas *stakeholder*.
3. Tidak hanya memandang perancangan sebagai sebuah desain fisik, namun juga memperhatikan non-fisik.
4. Mendukung slogan “Magelang Kota Sejuta Bunga”, program ruang terbuka hijau dan menerapkan prinsip ekologis yang memihak kelestarian lingkungan dan ‘penghuninya’.
5. Dirancang dengan proses yang melibatkan ‘penghuni’ kawasan.

6. Menyelesaikan isu prioritas, dengan teknologi dan *budget* yang sesuai dengan kapasitas daerah tidak sekedar berdampak instan, namun dapat berkelanjutan dampaknya bagi lingkungan dan penghuninya.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.5

Operasionalisasi Konsep

No	Fenomena Penelitian	Definisi Konsep	Sub Fenomena
1.	<p>Implementasi Program Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Teduh) di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, meliputi 7 kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan ruang terbuka hijau 2. Pembangunan ipal 3. Pembangunan jembatan 4. Pembangunan saluran drainase 5. Penyediaan air minum 6. Pengelolaan persampahan 7. Penyediaan proteksi kebakaran 	<p>Implementasi program menurut teori David C. Korten (1988) terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaatnya 2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana 3. Kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaatnya <ol style="list-style-type: none"> a.) Permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran b.) Pemahaman implementator tentang tujuan program Kampung Teduh c.) Pengurangan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh d.) Pengembangan potensi daerah e.) Peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana <ol style="list-style-type: none"> a.) Pemahaman implementator tentang tugas yang dibutuhkan program b.) Pemahaman mengenai tugas pokok dan kewenangan implementator c.) Kompetensi organisasi pelaksana dalam melaksanakan program 3. Kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana

			<ul style="list-style-type: none"> a.) Pemahaman mengenai keluaran program b.) Pemberdayaan masyarakat sebagai penerima manfaat c.) Kemampuan penerima manfaat untuk mengelola keluaran program
2.	Faktor yang menghambat Implementasi Program Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Teduh) di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang	<p>Faktor penghambat implementasi program menurut teori Gordon Chase (1979) terdapat hambatan utama dalam implementasi program yang dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Masalah operasional 2. Masalah sumber daya 3. Masalah keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masalah operasional <ul style="list-style-type: none"> a.) Ketersediaan pedoman teknis pelaksanaan b.) Kejelasan struktur tim pelaksana program c.) Program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disusun 2. Masalah sumber daya <ul style="list-style-type: none"> a.) Ketersediaan sumber dana dalam pelaksanaan program kampung teduh b.) Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kampung teduh c.) Kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kampung teduh 3. Masalah keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi lainnya. <ul style="list-style-type: none"> a.) Koordinasi antar kelompok kepentingan dalam pelaksanaan program b.) Dukungan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program c.) Dukungan dari kelompok sasaran terhadap pelaksanaan program

1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1.6

Tabel Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Implementasi Program Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Teduh) di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, meliputi 7 kegiatan :	1. Kesesuaian antara program dan penerima manfaatnya	a.) Permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran	Apakah permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran yang membutuhkan penanganan pemerintah	1. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang 3. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang 4. Kasi Pemerintahan Kelurahan Panjang 5. Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat) 6. Masyarakat Pelaku UMKM Kelurahan Panjang
			b.) Pemahaman implementator tentang tujuan program Kampung Teduh	Apakah tujuan dari program Kampung Teduh	
	1. Pembangunan ruang terbuka hijau 2. Pembangunan IPAL 3. Pembangunan jembatan 4. Pembangunan saluran drainase 5. Penyediaan air minum		c.) Pengurangan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh	Bagaimana perwujudan pengurangan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh	
			d.) Pengembangan potensi daerah	Bagaimana bentuk pengembangan potensi daerah	
			e.) Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Apakah kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dengan adanya program kampung teduh?	

6. Pengelolaan persampahan 7. Penyediaan proteksi kebakaran	2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana.	a.) Pemahaman implementator tentang tugas yang dibutuhkan program.	Apakah tugas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program.	1. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang 3. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang 4. Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat)
		b.) Pemahaman mengenai tugas pokok dan kewenangan implementator.	Apakah tugas pokok dan kewenangan dari masing-masing implementator.	
		c.) Kompetensi organisasi pelaksana dalam melaksanakan program.	Apakah kompetensi dan tugas pokok organisasi pelaksana sesuai dengan tugas yang dibutuhkan program.	
	3. Kesesuaian antara kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana.	a.) Pemahaman mengenai keluaran program.	Apakah yang menjadi keluaran dari program Kampung Teduh.	1. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang 3. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang
		b.) Pemberdayaan masyarakat sebagai penerima manfaat .	Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat sebagai penerima manfaat.	
		c.) Kemampuan penerima manfaat untuk mengelola keluaran program.	Bagaimana bentuk pengelolaan keluaran program oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.	

					<ul style="list-style-type: none"> 4. Kasi Pemerintahan Kelurahan Panjang 5. Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat) 6. Masyarakat Pelaku UMKM Kelurahan Panjang
2.	Faktor yang menghambat Implementasi Program Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Teduh) di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang	1. Masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan operasional.	a.) Ketersediaan pedoman teknis pelaksanaan.	Apakah terdapat pedoman teknis dalam pelaksanaan program.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang 3. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang 4. Kasi Pemerintahan Kelurahan Panjang 5. Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat) 6. Masyarakat Pelaku UMKM Kelurahan Panjang
			b.) Kejelasan struktur tim pelaksana program.	Bagaimana susunan struktur tim pelaksana yang terlibat dalam implementasi program.	
			c.) Program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disusun.	Apakah pelaksanaan program sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disusun.	
		2. Masalah-masalah yang	a.) Ketersedian sumber anggaran dalam	Bagaimana ketersediaan sumber alokasi anggaran	

		timbul dalam kaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan.	pelaksanaan program kampung teduh.	dalam implemementasi program kampung teduh .	<p>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang</p> <p>2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang</p> <p>3. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang</p> <p>4. Kasi Pemerintahan Kelurahan Panjang</p> <p>5. Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat)</p>
			b.) Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kampung teduh.	Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam implemementasi program kampung teduh.	
			c.) Kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kampung teduh.	Bagaimana kompetensi setiap aktor yang terlibat dalam implementasi program kampung teduh.	
		3. Masalah-masalah lain yang timbul karena keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi lainnya.	a.) Koordinasi antar kelompok kepentingan dalam pelaksanaan program..	Apakah koordinasi antar kelompok kepentingan dalam pelaksanaan program berjalan lancar.	<p>1. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang</p> <p>2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang</p> <p>3. Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang</p>

					<ol style="list-style-type: none">4. Kasi Pemerintahan Kelurahan Panjang5. Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat)6. Masyarakat Pelaku UMKM Kelurahan Panjang Tokoh Masyarakat Kampung Panjang
--	--	--	--	--	---

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara memperoleh data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada riset ini adalah sebagai berikut:

1.9.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana tipe penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif memberikan ruang yang lebih luas bagi objek penelitian untuk memberikan penjelasan atas suatu peristiwa yang dialami (Sutopo, 2006). Sehingga hal tersebut memudahkan peneliti untuk dapat memahami suatu peristiwa secara mendalam.

1.9.2 Lokus Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

1.9.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan individu yang menjadi sumber informasi terkait dengan sumber penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball*.

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang memiliki pengetahuan luas serta menguasai informasi mengenai Program Kampung Teduh kota Magelang. Untuk memperoleh data lebih lengkap dan mendalam peneliti menggunakan

Teknik *snowball* adalah teknik pencarian informan dalam sebuah jaringan berantai dari satu informan ke informan lain. Adapun informan penelitian berdasarkan teknik tersebut meliputi Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang, Kasi Pemerintahan Kelurahan Panjang, Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat), Masyarakat Pelaku UMKM Kelurahan Panjang.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.9.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif menggunakan kata-kata, kalimat, teks yang menggambarkan tindakan-tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial (Noeng Muhadjir, 1996). Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara maupun hasil dokumentasi berupa foto, video keadaan di lapangan.

1.9.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan, dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara dan hasil pengamatan lapangan yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber langsung tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota

Magelang, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang, Kasi Pemerintahan Kelurahan Panjang, Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat), Masyarakat Pelaku UMKM Kelurahan Panjang.

- b. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari instansi yang terkait penelitian, studi kepustakaan dari penelitian-penelitian terdahulu, media cetak, media internet serta catatan lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai penguat kegiatan analisis.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

- a) Teknik wawancara

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas dan terpimpin. Dalam jenis wawancara ini pewawancara harus pandai dalam mengarahkan narasumber bila narasumber menyimpang karena dalam jenis ini pewawancara hanya akan membuat pokok masalah yang akan diteliti kemudian selanjutnya dalam wawancara berlangsung mengikuti situasi. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan pendekatannya menggunakan petunjuk umum wawancara (Ahmadi, A.,dkk, 2010). Wawancara dilakukan dengan informan yang terdiri dari Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Lurah/Kepala Desa Kelurahan Panjang, Kasi

Pemerintahan Kelurahan Panjang, Ketua KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat), Masyarakat Pelaku UMKM Kelurahan Panjang.

b) Teknik observasi

Teknik observasi merupakan kegiatan mencatat fenomena secara sistematis (Ahmadi, A.,dkk, 2010). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan kepada subyek penelitian dalam hal ini permukiman kumuh mengenai kondisi permukiman saat ini dan melihat jalannya hasil pelaksanaan Program Kampung Teduh di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

c) Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini melalui pengumpulan data dengan mempelajari benda-benda tertulis meliputi buku, data monografi, peraturan-peraturan, dokumen pelaksanaan program, serta penelitian terdahulu..

1.9.6 Teknik Validitas dan Analisis Data

1.9.6.1 Teknik Validitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik uji validitas triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan sesuatu selain data untuk mengecek atau membandingkan data (Hadi, Sutrisno, 2004). Triangulasi yang digunakan dalam studi riset ini adalah triangulasi sumber dan metode. Peneliti memperoleh data ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membandingkan hasil jawaban satu orang dengan orang lainnya.
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan.

- c) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi yang telah dikumpulkan.

Dari langkah-langkah tersebut, peneliti mampu mendapatkan keabsahan data. Hal tersebut mampu meminimalisir kecurigaan tentang data lapangan yang diperoleh peneliti dari beberapa informasi di lapangan.

1.9.6.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1984), dimana teknik interaktif digunakan untuk memperoleh data secara akurat yaitu dengan melalui 3 proses analisis yang meliputi :

- a) Proses reduksi data

Terlebih dulu menentukan informasi data terkait dengan fokus serta masalah dalam penelitian, kemudian menyandikan atau mengklasifikasikan informasi maupun data yang didapat untuk melacak data (Ahmadi, A.,dkk, 2010). Dalam reduksi data ini, peneliti mencatat transkrip wawancara, kemudian mencatat hasil wawancara tersebut, kemudian peneliti memilahnya dengan kebutuhan pengkodean. Transkrip tidak perlu maka diabaikan dan wawancara yang sangat penting sebaiknya dimasukkan ke dalam hasil.

- b) Penyajian data

Berfungsi dalam menyediakan kumpulan informasi yang dihimpun, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel serta bagan. Menarik kesimpulan berarti

mencari makna, membuat gagasan dan klasifikasi, mengukur arus kausalitas, dan menyusun proposisi untuk menarik kesimpulan yang baik dan benar.

c) Penarikan kesimpulan

Menjadi tahap akhir dari analisis data meliputi penyesuaian data dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Kesimpulan membantu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

1.10 Kerangka Berpikir Penelitian

